

MEMPOSISIKAN MASYARAKAT SEBAGAI GARDA DEPAN PELESTARI SUMBER DAYA ARKEOLOGI

Wasita¹
(Balai Arkeologi Banjarmasin)

Abstrak

Indonesian archaeologists are challenged by the huge number of cultural heritage that to be conserved. Concerning with this, the involvement of people surrounding the heritage places, as one of instrument of conservation, is very important. However, innovation in method and strategy to increase the people awareness in any conservation activities are still to be done.

Kata kunci: masyarakat, pelestarian, sumberdaya arkeologi

A. Pendahuluan

Masyarakat merupakan kekuatan yang perlu diperhitungkan dan dimanfaatkan untuk menjaga keutuhan dan kelestarian benda cagar budaya. Mereka menempati setiap ruang dan lapisan di Republik ini. Oleh karena itu, kekuatan yang mereka miliki sangat strategis untuk turut mengamankan sumberdaya arkeologi (SDA). Permasalahannya, bagaimana kita dapat membangkitkan kekuatan tersebut dan memanfaatkannya untuk pelestarian dan pengamanan SDA?

Nurhadi (2000) dalam tulisannya yang berjudul "Penelitian Arkeologi dari GBHN ke GBHN" menyitir pemikiran Bung Karno bahwa hasil penelitian ilmiah baru akan memiliki makna apabila dapat dimanfaatkan dan memberikan dampak

positif bagi kehidupan umat manusia. Nurhadi menyebutkan bahwa penelitian arkeologi harus mampu memberikan akuntabilitas publik tanpa mengesampingkan akuntabilitas akademiknya. Pemikiran yang demikian ini menuntut kita agar bekerja dengan baik demi kepentingan masyarakat dan Bangsa Indonesia.

Di sisi lain, pemahaman masyarakat terhadap arkeologi masih cukup beragam. Ada sebagian masyarakat yang antipati dengan tinggalan masa kolonial, karena hal tersebut dianggap merupakan bukti kekuatan bangsa asing dalam melakukan penindasan di Indonesia, sehingga bukti tersebut tidak perlu dilestarikan. Sementara sebagian masyarakat berpandangan demikian, di pihak lain kiprah arkeologi masih cenderung hanya bergerak dalam ruang lingkup

¹⁾ Penulis adalah Peneliti Muda bidang arkeologi pada Balai Arkeologi Banjarmasin.
E-mail: wasita66@yahoo.com

profesionalisme yang terbatas. Oleh karena itu Kosasih (2000) mengusulkan agar dalam era pembangunan dewasa ini perlu adanya pengembangan visi bagi dunia arkeologi di Indonesia. Pengembangan visi yang dimaksud adalah dengan mencanangkan perspektif yang lebih luas tentang peranan dan fungsi arkeologi dalam pembangunan nasional, agar arkeologi dapat lebih bermakna bagi kehidupan bermasyarakat (Kosasih, 2000) bahkan juga berbangsa dan bernegara.

Ternyata upaya untuk dapat menyentuh masyarakat dalam tataran yang lebih luas guna memberikan kontribusinya saja masih merupakan suatu masalah. Jika demikian halnya, maka keinginan untuk melibatkan masyarakat menjadi garda depan pelestari (SDA) kemungkinan akan mendapat tanggapan negatif. Oleh karena itu, keinginan untuk dapat memposisikan masyarakat sebagai pelestari perlu kerja keras para arkeolog. Untuk mewujudkannya apa yang harus dilakukan? Langkah apa sajakah yang harus ditempuh? Dimulai dari manakah langkah tersebut? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Apa kendalanya dan, bagaimana cara mengatasinya?

B. Masyarakat dan Sumber Daya Arkeologi di Indonesia

Keberadaan Benda Cagar Budaya (BCB) atau Sumber Daya Arkeologi (SDA) ada yang jauh dari permukiman masyarakat tetapi ada juga yang berada di tengah-tengah masyarakat. BCB yang berada jauh dari permukiman umumnya merupakan tinggalan-tinggalan yang berada di sebuah lereng bukit atau gunung yang tinggi dan terjal. Mengingat lokasinya yang sulit dijangkau, manusia yang hidup kemudian

kurang memilih tempat tersebut untuk dijadikan sebagai tempat tinggal. Akibatnya, situs tersebut menjadi berada jauh dari permukiman masyarakat sekarang, contohnya antara lain, situs prasejarah di Gunung Marang, yang berada jauh di tengah hutan Kabupaten Kutai Timur, dan sebagian Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Adapun situs yang berada di tengah-tengah masyarakat umumnya merupakan bagian dari sejarah nenek moyangnya yang terpaut tidak terlalu jauh. Selanjutnya generasi penerusnya melanjutkan kehidupan mereka di lokasi yang dahulu dijadikan sebagai tempat nenek moyangnya bermukim. Oleh karena itu, BCB dari nenek moyangnya tidak jauh dari permukiman generasi penerusnya. Contoh yang demikian ini adalah situs-situs di perkampungan Dayak, situs Islam, dan bahkan kolonial.

1. Beberapa Contoh SDA yang Telah Ditangani

Beberapa situs monumental yang besar di Jawa banyak yang telah ditangani sehingga tertata dengan rapi. Hal ini dapat kita lihat pada Candi Borobudur, Prambanan, Ratu Boko, dan masih banyak lagi. Situs-situs tersebut cukup terjaga, bahkan untuk Candi Borobudur ada sekelompok masyarakat yang juga turut memanfaatkan candi untuk kepentingan kelompok mereka. Memang ada dilema dalam hal ini. Candi yang dahulu ditemukan dalam kondisi sebagai *dead monument*, maka kini ada sekelompok masyarakat yang kembali memanfaatkan candi untuk kepentingan ritual mereka. Dalam aturan UU Kepurbakalaan yang ada di Republik ini mestinya hal tersebut tidak

diperbolehkan. Akan tetapi kenyataannya hal tersebut masih saja terus berlangsung hingga dewasa ini.

Ada dua hal yang sangat bertentangan dalam hal ini. Pertama, pemanfaatan kembali atas *dead monument* menjadi *living monument* adalah tindakan yang tidak diperbolehkan. Kedua, ada manfaat yang selama ini diperoleh atas dipergunakannya candi dan kawasan tersebut untuk kegiatan sekelompok masyarakat, yaitu ada kekuatan sekelompok masyarakat yang turut menjaga keutuhan candi karena menyangkut kepentingan mereka.

Memang sudah sepantasnya aturan tetap kita tegakkan dan upaya pelestarian tetap kita jalankan. Kedua hal tersebut harus tetap seiring. Aturan tidak memberi peluang untuk menghidupkan *dead monument* karena pada prinsipnya beberapa tinggalan masa lalu merupakan bagian dari kegiatan nenek moyang yang untuk sekarang ini sudah tidak mendapat pengakuan dalam kehidupan keberagaman di Indonesia. Sebagai contoh kepercayaan animisme dan dinamisme yang menyembah benda mati dan benda hidup yang ada di sekitarnya. Karena menghidupkan kembali *dead monument*, misal penyembahan batu besar atau arca menhir di Gunungkidul yang ditemukan dalam keadaan tidak dipergunakan lagi, maka hal tersebut tidak diperkenankan. Berkaitan dengan pernyataan tidak diperkenankannya menghidupkan kembali *dead monument* menjadi *living monument*, maka yang demikian ini rasanya terjadi juga pada situs Candi Borobudur.

Di Sangiran juga banyak kita jumpai beberapa orang yang justru beraktivitas melakukan pencarian fosil untuk diperdagangkan. Hal ini jelas sangat bertentangan dengan upaya pelestarian. Sangiran sebenarnya merupakan situs besar dan di tempat tersebut juga berdiri sebuah kantor yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) untuk menangani situs tersebut karena Sangiran merupakan salah satu situs warisan dunia yang harus dilestarikan. Sangiran yang merupakan salah satu bukti sejarah perjalanan hidup manusia ternyata mendapat banyak perhatian masyarakat. Sebagian masyarakat bermaksud untuk menjaga keutuhan tinggalan yang ada di dalamnya, tetapi sebagian yang lain justru ingin mencari keuntungan dari situs tersebut dengan cara yang tidak benar. Upaya-upaya penjualan temuan fosil oleh masyarakat perlu mendapat perhatian untuk segera ditangani.

Sementara itu perilaku masyarakat sekitar Sangiran pada umumnya berubah dengan banyak ditemukannya fosil dan beberapa kelompok atau oknum ternyata mencoba mencari peluang untuk memperoleh fosil tersebut dari masyarakat. Bahkan masyarakat telah mengenal adanya insentif atas penemuan fosil, sejak masa-penelitian Von Koenigswal, tahun 1934-1936 (Sulistyanto, 1995). Memang perubahan perilaku masyarakat tidak hanya karena pendirian museum di sana. Menurut Bambang Sulistyanto (2001) paling tidak ada beberapa hal yang menjadikan perubahan perilaku tersebut yaitu antara lain: perubahan gaya hidup, tersedianya fasilitas umum, munculnya sindikat fosil,

kemampuan memalsu fosil, fosil sebagai barang komoditi, terbukanya lapangan pekerjaan, alih mata pencaharian, peningkatan kesejahteraan dan pergeseran peranan ibu.

Memang upaya pelestarian sangat bagus jika bisa melibatkan masyarakat. Hanya saja tidak harus melibatkan atau membentuk sekelompok masyarakat untuk kembali memanfaatkan *dead monument* menjadi *living monument* agar mereka selain memanfaatkan sekaligus menjadi garda depan dalam pelestariannya. Pelibatan masyarakat untuk pelestarian mestinya dilakukan dengan menanamkan kesadaran mereka akan warisan leluhur yang harus dihargai, diteladani nilai-nilai luhurnya, dan dijadikan kebanggaan sebagai bagian dari identitas kebangsaan kita.

2. Beberapa Contoh SDA yang Belum Ditangani

Sumberdaya arkeologi yang belum ditangani dan bahkan mendapatkan perlakuan yang bersifat merusak juga cukup banyak kita temui. Kawasan Situs Gua Babi merupakan salah satu contoh yang ada di Kalimantan. Situs ini merupakan situs hunian prasejarah yang cukup lengkap yang pernah ditemukan di Kalimantan. Penelitian yang pernah dilakukan oleh Balai Arkeologi Banjarmasin yang tertuang dalam Laporan Penelitian Arkeologi (LPA) dan Berita Penelitian Arkeologi (BPA), pada prinsipnya menyebutkan bahwa kawasan situs Gua Babi merupakan situs prasejarah dengan potensi yang cukup besar, temuannya meliputi peralatan untuk mencari makan seperti alat batu dan tulang, alat dapur (gerabah), sisa makanan (cangkang

moluska), perhiasan, dan tulang manusia (yang menunjukkan adanya aktivitas penguburan dimasa lampau) (Widianto dkk, 1997; Widianto dan Retno Handini, 1998/99; dan 2003).

Intensitas penelitian yang cukup sering dilaksanakan dan tidak sepadan dengan penyuluhan yang dilakukan ternyata membawa persepsi yang salah di kalangan masyarakat. Buktinya, ketika penelitian tersebut usai dan selanjutnya berhenti dalam beberapa tahun, ternyata pada tahun 2002 diketahui masyarakat telah melakukan penggalian ulang pada situs tersebut. Penggalian ulang dilakukan persis pada kotak-kotak yang dahulu pernah diekskavasi dalam penelitian arkeologi. Penggalian ulang oleh masyarakat tersebut didorong oleh keingintahuan mereka akan isi kotak gali tersebut. Perlakuan "istimewa" terhadap kotak gali yang ditutup atau diurug lagi dengan dilapisi plastik pada dasar kotaknya tersebut justru menimbulkan keingintahuan mereka yang semakin besar. Karena tidak ada informasi yang disampaikan ke masyarakat, maka mereka berusaha mendapatkan sendiri informasi yang mereka inginkan tersebut dan dengan cara mereka sendiri, yaitu dengan cara membongkar ulang kotak tersebut untuk dapat melihat langsung apa yang ada di dalamnya.

Sementara itu penggalian juga dilakukan oleh masyarakat pada beberapa gua yang sebelumnya belum diteliti. Penggalian pada gua yang demikian ini dimaksudkan untuk mencari guano untuk pupuk sehingga hasil panen sawah dan ladang mereka meningkat. Penggalian ini ternyata juga cukup merusak karena mereka tidak saja menghabiskan guano

yang ada pada lapisan gua yang mereka gali, tetapi juga melanjutkan penggaliannya hingga ke lapisan budaya.

Memang situs semacam ini belum ditangani dalam tataran yang intensif. Oleh karena itu, pengamanan diserahkan kepada juru pelihara yang tinggal di kampung yang sama dengan lokasi gua tersebut. Ketika tata organisasi di departemen yang menaungi bagian kebudayaan mengalami perubahan, maka keberadaan juru pelihara di daerah tidak terakomodir. Oleh karena itu, secara tiba-tiba mereka tidak memperoleh gaji. Dalam kondisi ini mereka, termasuk juru pelihara situs Gua Babi, mengalihkan pekerjaannya ke bidang lain. Dengan demikian efektivitas kerja juru pelihara sudah tidak ada lagi. Pada saat tersebut masyarakat mulai melihat potensi batu gunung sebagai aset yang dapat dijual. Oleh karena itu, sebagian masyarakat mulai menambang batu untuk dijual. Kini penambangan tersebut makin meluas. Tidak hanya di kawasan Gua Babi, tetapi juga di daerah lain dan tidak jarang merusak gua-gua yang dahulu merupakan situs arkeologi (Sugiyanto, 2002).

Memang, gua-gua ini umumnya ada di luar permukiman. Namun demikian bukan berarti bahwa situs-situs yang ada di tengah-tengah perkampungan akan aman dari jorjoran tangan jahil. Sebagai contoh baluntang yang digunakan sebagai salah satu kelengkapan upacara kematian penganut kaharingan keberadaannya juga di tengah-tengah kampung mereka sendiri, juga banyak yang hilang karena dicuri atau dijual oleh pemiliknya. Meskipun kita belum dapat membuktikan, yang jelas kerusakan terjadi baik pada situs atau benda arkeologi yang ada di tengah-tengah permukiman

maupun yang jauh dari permukiman, yang sudah mendapat penanganan intensif (Sangiran), yang sekedar dijaga oleh juru pelihara (Gua Babi), atau pun yang dijaga para pewarisnya sendiri (misalnya, baluntang).

C. Menjadikan Masyarakat sebagai Garda Depan Pelestari SDA

1. Penyuluhan Hukum

Penyuluhan hukum merupakan aspek paling mendasar yang harus segera dipahami oleh masyarakat. Dengan bekal pengetahuan dan pemahaman hukum yang memadai diharapkan masyarakat akan tergerak kemauannya untuk dapat menyadari posisinya jika mereka menemukan benda purbakala. Bukan aspek hukum saja yang dijadikan sebagai pendorong kuat untuk turut mengamankan BCB, tetapi lebih dari itu aspek pemanfaatan BCB untuk masyarakat, yaitu sebagai bukti sejarah perjalanan bangsa, keunggulan budaya nenek moyang, dan juga pembelajaran. Kerangka besar inilah yang harus ditanamkan, karena hanya dengan memahami manfaat yang dapat diperoleh dalam jangka panjanglah yang akan mendorong manusia tergerak, dan mengesampingkan manfaat sesaat dan pribadi. Untuk mewujudkan hal ini jelas memerlukan suatu kerja keras yang panjang. Tidak mungkin, sekali ceramah akan menghasilkan masyarakat yang langsung sadar sesadar-sadarnya. Pengawasan harus tetap ada. Oleh karena itu, aspek lain yang tidak kalah pentingnya adalah pembentukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kebudayaan (PPNS Kebudayaan) yang akan mengefektifkan perhatiannya pada kerja pegawai negeri

dan keamanan tinggalan budaya. Konsekuensinya PPNS kebudayaan tersebut harus dibentuk dalam jumlah yang memadai sesuai dengan jumlah situs yang perlu diamankan.

2. Situs sebagai Bagian dari Kepentingan Masyarakat

Program untuk menjadikan situs sebagai bagian dari kepentingan masyarakat adalah impian yang cukup banyak tantangannya. Beberapa situs yang telah dikelola dengan intensif pun belum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat apalagi yang belum dikelola. Pelestarian dan pengembangan Situs Ratu Boko yang berlangsung selama ini misalnya mengalami berbagai kendala. Upaya maksimal yang telah dilakukan tidak membawa hasil yang sepadan. Masyarakat sekitar Situs Ratu Boko merasa belum dapat memperoleh manfaat optimal dari upaya pelestarian dan pengembangan yang telah dilakukan (Hartono, 2004).

Berbeda halnya dengan yang terjadi di Sangiran, pemerintah justru seringkali dinilai lupa mengikutsertakan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan dan tidak mau tahu kenyataan adanya perbedaan persepsi dalam memberi makna cagar budaya. Upaya pelestarian di Situs Sangiran lebih banyak dilakukan dengan cara penegakan hukum semata, tanpa ada niat untuk mencari solusi yang langsung mengenai akar permasalahannya (Sulistiyanto, 2003).

Saya rasa tidak ada cara lain bahwa untuk menjadikan masyarakat merasa memiliki dan akhirnya dapat dilibatkan dalam pelestarian, situs dan benda arkeologi harus dijadikan sebagai

bagian dari kepentingan masyarakat setempat. Bagian dari kepentingan masyarakat yang mesti disentuh adalah ekonomi, ikatan emosional, pendidikan dan kebanggaan terhadap warisan leluhur. Di samping itu perlu dibangkitkan pula kesadaran masyarakat akan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang BCB untuk dapat dipahami dan diaplikasikan dalam kehidupan dalam kaitannya dengan interaksi mereka dengan BCB.

Bidang ekonomi yang dapat melibatkan masyarakat antara lain menjadikan masyarakat sebagai bagian dari kegiatan ekonomi situs. Sebagai contoh, misalnya membimbing mereka untuk dapat berusaha di bidang yang terkait dengan situs misalnya industri kerajinan, pemandu wisata, penginapan. Upaya-upaya tersebut perlu dilakukan dengan pembimbingan pemerintah. Hal yang tidak kalah penting adalah upaya tersebut harus mendahulukan masyarakat sekitar untuk dapat mengambil perannya, daripada memberi peluang kepada pemodal besar dari luar. Di samping itu, pekerja-pekerja di bidang pariwisata juga perlu melibatkan masyarakat sekitar objek yang dikelola.

Kegiatan-kegiatan wisata ziarah misalnya juga perlu diberikan masukan oleh pihak kepurbakalaan. Masukan tersebut perlu disampaikan dalam hal cerita sejarah dan nilai kepurbakalaannya. Informasi tersebut tidak saja disampaikan melalui pemandu wisata tetapi perlu juga disampaikan dalam bentuk tulisan seperti *leaflet* yang disebarluaskan secara luas di area wisata ziarah. Hal ini sangat penting untuk mengarahkan para peziarah agar ziarahnya dilakukan dengan benar dan unsur

penghargaan kepada warisan sejarah dan nilai luhurnya dapat teraih di sini.

3. Masyarakat Sebagai Bagian dari Pengelola SDA

Masyarakat perlu dilibatkan menjadi salah satu unsur pengelola situs apalagi jika situs tersebut dijadikan sebagai objek wisata. Tentu masyarakat sudah harus dilibatkan sejak awal perintisannya. Kasus di Sangiran misalnya, pelibatan masyarakat untuk pelestarian situs sebenarnya sudah dimulai sejak awal. Dalam pengumpulan fosil atau koleksi museum, masyarakat yang menemukan diminta untuk menyerahkan temuannya ke museum dengan ganti rugi. Ini suatu niat baik dari pemerintah (museum) yang cukup terpuji. Hanya saja dalam pelaksanaannya di lapangan tidak jarang masyarakat yang menemukan fosil umumnya hanya menyerahkan temuannya yang fragmentaris. Sementara temuan yang relatif utuh akan disimpan untuk dicarikan pembeli yang bersedia membayar dengan harga lebih tinggi daripada ganti rugi dari museum (Sulistiyanto, 1995) dan bahkan ada yang dibuat benda kerajinan untuk meningkatkan nilai jual benda tersebut (Sulistiyanto, 1996). Ini merupakan salah satu kendala yang dihadapi di lapangan. Namun, hal tersebut jangan dijadikan alasan untuk tidak melibatkan masyarakat dalam melestarikan SDA. Kesadaran masyarakat adalah target utama untuk dapat memposisikan masyarakat sebagai garda depan pelestari SDA.

Jika pilihan pelestarian dilakukan dengan membuat museum, ketika semua sudah siap, museum dibuka untuk umum dan menjadi objek wisata. Keberhasilan arkeolog dalam mewujudkan peninggalan

purbakala menjadi objek pariwisata akan memberi dampak yang cukup luas kepada masyarakat. Sebagaimana dapat ditunjukkan di berbagai tempat tujuan wisata, kesejahteraan masyarakat bersangkutan jelas meningkat dengan berkembangnya kemampuan masyarakat untuk menambah penghasilan, misalnya lewat ketrampilan pembuatan benda-benda souvenir serta dalam melakukan pelayanan dan jasa wisata lainnya (Soebadio, 1993/1994:5). Akan lebih terasa lagi kedekatan masyarakat dan instansi yang menaungi kepurbakalan tersebut jika para arkeolog juga memberikan bimbingan atau konsultasi gratis kepada masyarakat dalam hal kecakapan menjadi pemandu wisata, model-model souvenir dan lain-lain.

Sebenarnya langkah-langkah pengembangan Borobudur melalui penataan kawasan termasuk pembangunan Pasar Seni Jagad Jawa (PSJJ) dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan kepentingan Pemerintah Daerah Jawa Tengah. Oleh karena itu dapat dipahami bila rencana ini dianggap memiliki nilai strategis dan ekonomi, sekaligus merupakan skenario pengembangan industri wisata yang tidak terlepas dari pertimbangan investasi dan bisnis. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan oleh Bank Dunia dalam memberikan hibah dan bantuan teknis untuk penyelamatan objek arkeologis kawasan bersejarah yang dikembangkan untuk wisata yang lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat setempat. Pelibatan komunitas itu sendiri diawali sejak gagasan muncul melalui proses penyerapan keinginan ideal masyarakat, mulai dari penyusunan

program hingga pelaksanaannya melalui tindakan realistik (Koeswhoro, 2003).

Pemerintah dengan berbagai dinas yang menaunginya perlu turun tangan untuk turut membina masyarakat agar dapat mengambil peran dengan terbentuknya objek wisata tersebut. Pemerintah mestinya berpihak kepada masyarakat sekitar dan tidak kepada pemodal besar untuk memberi peluang bisnis di sekitar objek wisata tersebut (misalnya Borobudur). Hal yang demikian ini akan menjadikan masyarakat benar-benar merasa memperoleh tempat dan merasa dilibatkan untuk pengembangan objek tersebut.

4. Pembelajaran

Hal yang lebih baik lagi tentunya adalah manfaat pembelajaran yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Objek tinggalan yang masih terkait dengan masyarakat akan sangat berguna jika kebijakan pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat pada umumnya berdasarkan permasalahan yang ada dan terjadi di masyarakat tersebut. Tentu akan sangat dekat persamaan dan strategi yang dipergunakan jika pengembangan masyarakat dilakukan di sebuah perkampungan yang masih melanjutkan budaya nenek moyangnya. Jika mereka memanfaatkan kearifan, nilai-nilai luhur, dan ajaran moral yang terpuji dari pendahulu mereka tentu ini merupakan strategi yang sangat baik untuk suksesnya pemberdayaan. Terlebih lagi permasalahan yang muncul di perkampungan tersebut tentu sangat spesifik dan mungkin sekali dapat diselesaikan dengan mendasarkan pada nilai-nilai yang terkandung dalam tinggalan tradisi di kampung tersebut.

D. Kendala dan Antisipasinya

Kendala utama dalam program jangka panjang ini adalah jangka waktu untuk mengubah pandangan masyarakat dan juga kemungkinan untuk dapat mengakomodir kepentingan dari beberapa pihak. Alokasi waktu yang diperlukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang benda dan situs purbakala serta perlindungannya bukan merupakan sesuatu yang dapat dilakukan baik membalik telapak tangan. Penyuluhan yang terus-menerus tidak mesti menghasilkan manfaat yang signifikan. Tingginya tingkat pendidikan tidak berkorelasi positif dengan perilaku (Surakhmad, 1908), oleh karena itu yang lebih penting dalam hal ini adalah niat baik setiap individu, bukan tingkat intelektualitasnya.

Berbagai kelompok masyarakat yang terlibat dalam urusan penanganan warisan purbakala dan juga kewasannya memiliki kepentingan yang berbeda. Suatu contoh dalam pengelolaan kawasan karst di Ponjong, Gunung Kidul, permasalahannya lebih banyak disebabkan karena perbedaan persepsi dalam pemanfaatan sumberdayanya. Di satu pihak, terdapat ahli pertanian (akademia), beberapa orang penduduk, dan investor pertambangan yang melihat gua-gua arkeologis mempunyai potensi tinggi untuk menyediakan bahan galian yang akan menguntungkan secara finansial atau ekonomi. Namun, di pihak lain terdapat ahli arkeologi (akademia), kebanyakan masyarakat, dan berbagai lembaga pemerintah yang melihat potensi gua-gua tersebut bukan dari kandungan bahan galian. Kebanyakan masyarakat dan pihak pemerintah (Dinas Pariwisata, Kecamatan, dan Kelurahan) lebih melihat

potensi gua dari kemungkinannya untuk dipakai sebagai tempat wisata, yang menarik kalau tetap asli, asri dan lestari. Sementara itu, pihak arkeologi dan Bappeda cenderung melihat kebutuhan akan terlestarikannya kawasan karst secara keseluruhan. Apalagi daerah Ponjong adalah kawasan resapan atau tangkapan air bagi sungai-sungai bawah tanah di bagian hilirnya. Jadi, faktor kebutuhan yang berbeda menyebabkan munculnya konflik kepentingan dalam pengelolaan gua-gua. Dalam kaitannya dengan hal tersebut di atas, maka untuk selanjutnya perlu dibuat sebuah model pengelolaan sumberdaya budaya Pertama, untuk dapat mengembangkan pengelolaan sumberdaya budaya dengan sasaran terlestarikannya gua-gua arkeologis, sektor budaya tidak dapat melakukannya sendiri. Kegiatan ini harus melibatkan berbagai pihak yang peduli dan terlibat dalam aspek-aspek pelestarian kawasan. Sejak awal, masyarakat setempat harus diikuti dalam pengambilan keputusan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaannya. Kedua, untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan kebutuhan pokok, perlu dicarikan substitusi matapencaharian hidup, khususnya bagi tenaga kerja yang selama ini terlibat dalam penambangan bahan galian. Selanjutnya perlu dipertimbangkan untuk menemukan "leading sector" yang akan menjadi ujung tombak dalam proses pelestarian kawasan dengan pengelolaan sumberdaya budaya sebagai bagian darinya (Yuwono.2006)

E. Penutup

Upaya pelestarian dengan melibatkan masyarakat adalah ide yang cukup strategis dan konsekuensinya hal tersebut membutuhkan kerja keras, namun tidak ada jaminan dalam tempo yang singkat hal tersebut akan dirasakan hasilnya. Pekerjaan ini harus melalui proses yang panjang dan secara terus-menerus dilakukan. Tidak tertutup kemungkinan adanya inovasi cara dan metode untuk mempermudah dan mempercepat tercapainya keinginan tersebut.

Terlebih lagi dalam suasana kehidupan ekonomi yang kurang begitu baik di negeri ini. Kondisi tersebut besar pengaruhnya terhadap perhatian dan penghargaan masyarakat terhadap warisan sejarah dan purbakala. Pada saat masyarakat cenderung mengkonsentrasikan perhatiannya pada upaya untuk memenuhi kebutuhan primer mereka, urusan yang menyangkut warisan purbakala kurang mereka perhatikan. Masalahnya sangat praktis, jika mengurus hal tersebut kehabisan waktu untuk mencari nafkah karena mengurus hal tersebut tidak menghasilkan nasi untuk memenuhi kebutuhan primernya.

Memang, pariwisata dengan objek benda purbakala juga akan mendatangkan dampak positif bagi masyarakat. Hanya saja hal ini tidak akan datang dalam proses yang cepat. Di sisi lain kebutuhan perut memaksa setiap hari untuk diisi. Sangat logis jika masyarakat lebih suka mengerjakan sesuatu yang langsung didapatkan hasilnya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh sebagian masyarakat Sangiran dan bukti banyaknya baluntang yang hilang walaupun keberadaanya ada

di tengah-tengah perkampungan yang mereka huni.

Pada dasarnya semua itu bukanlah masalah besar, yang penting upaya untuk pelestarian harus terus dijalankan dan masyarakat terus dilibatkan untuk itu, seberapa besar peran yang bisa mereka ambil. Hanya dengan cara ini masyarakat akan mengalami sendiri prosesnya sehingga jika sudah sampai pada saatnya nanti mereka akan lebih menghayati nilai penting warisan purbakala yang ada di lingkungan mereka.

Kita harus yakin bahwa jika warisan purbakala sudah siap menjadi objek wisata, maka masyarakat akan menaruh perhatian padanya untuk dapat memperoleh rezeki atas keberadaan objek wisata tersebut. Pada saat inilah kita dapat masuk lebih

intensif lagi. Tidak hanya memberikan bimbingan tentang aspek ekonomis saja, tetapi juga kepurbakalaan dan nilai-nilai di dalamnya. Hal ini perlu mereka pahami untuk dapat diterapkan dalam kaitannya dengan usaha mereka baik dalam bidang souvenir, maupun asesoris dalam usaha rumah makan, penginapan dan lain-lain. Masyarakat perlu didorong untuk menonjolkan identitas warisan budaya yang ada di lingkungannya guna dijadikan sebagai hal unik yang tidak dapat dijumpai di tempat lain. Dengan demikian diharapkan turis akan merasa mendapatkan sesuatu yang unik di lingkungan mereka. Tidak saja unik dalam hal kepurbakalaan tetapi juga warisan leluhur yang masih diimplementasikan oleh masyarakat.

Daftar Pustaka

- Hartono, Tri. 2004. "Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Pelestarian Dan Pengembangan Situs Ratu Boko", *Thesis*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Koeswhoro, Pudjo. 2003. "Kontroversi Jagad Jawa Borobudur", *Suara Merdeka* 11 Januari 2003. Semarang
- Kosasih, EA. 2000. "Pemahaman Masyarakat Terhadap Arkeologi Indonesia: Antara harapan dan Kenyataan", *Proceedings Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*: Jakarta: Pusat Arkeologi. Hlm. 203-228.
- Nurhadi. 2000. "Penelitian Arkeologi dari GBHN ke GBHN", *Proceedings Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Arkeologi. Hlm. 264-276
- Soebadio, Haryati. 1993/94. "Arkeologi dan Pengembangan Sosial Budaya", *Pertemuan Ilmiah Arkeologi VI*. Jakarta: Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Hlm. 3-14.
- Sugiyanto, Bambang. 2002. "Penelitian Gua Prasejarah di Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalsel", *Laporan Penelitian Arkeologi*.

- Banjarbaru: Balai Arkeologi Banjarmasin. Belum Terbit.
- Sulistiyanto, Bambang. 1995. "Perilaku Masyarakat terhadap Benda Cagar Budaya Sangiran: Studi kasus di Desa Krikilan", *Berkala Arkeologi Tahun XV No. 1*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta. Hlm. 46-63.
- _____. 1996. "Perubahan Sosial di Kawasan Benda Cagar Budaya Sangiran: Studi kasus tentang perubahan perilaku", *Berkala Arkeologi Tahun XVI No. 2*. Yogyakarta: Balai Arkeologi Yogyakarta. Hlm. 28-41.
- _____. 2001. "Perubahan Nilai Magis Fosil Kawasan Sangiran", *Proceedings Evaluasi Hasil Penelitian Arkeologi*. Jakarta: Pusat Arkeologi. Hlm. 207-229.
- _____. 2003. *Balung Buto: Warisan Budaya Dunia dalam Perspektif Masyarakat Sangiran*. Yogyakarta: Kunci Ilmu.
- Surakhmad, Winarno. 1980. *Mewujudkan Nilai-Nilai Hidup Dalam Tingkah Laku Sebuah Ikhtisar Pedoman Pendekatan Metodologik*. Bandung: Tarsito.
- Widianto, Harry, Truman Simanjuntak, dan Budianto Hakim. 1997. "Ekskavasi Situs Gua Babi, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan", *Berita Penelitian Arkeologi No. 01*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Widianto, Harry, dan Retno Handini. 1998/99. "Penelitian Situs Gua Babi Tahap III dan IV Kecamatan Muara Uya, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan", *Laporan Penelitian Arkeologi*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- _____. 2003. "Karakter Budaya Prasejarah di Kawasan Gunung Batubuli, Kalimantan Selatan: Mekanisme Hunian Gua Pasca Pleistosen", *Berita Penelitian Arkeologi No. 12*. Banjarmasin: Balai Arkeologi Banjarmasin.
- Yuwono, J Susetyo. 2006. "Peran Stakeholders Dalam Pengelolaan Sumberdaya Arkeologi", *Makalah Cultural Resource Management di Yogyakarta*.